

**Komunikasi Publik sebagai Alat pembantu Penguatan  
Penegakan Hukum Lingkungan di Aceh**

**Munawir**

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Email:munawwir.mz@gmail.com

**ABSTRACT**

The background of this research focuses on the importance of public communication in supporting environmental law enforcement in Aceh. Although various policies related to environmental law have been established, the implementation of effective public communication to raise legal awareness in Aceh society still faces numerous challenges, such as limited public understanding and inadequate coordination among stakeholders. This study aims to explore how public communication can strengthen environmental law enforcement in Aceh and identify the obstacles in its implementation. The research employs a qualitative method with a literature review approach that analyzes previous studies and existing policies. The findings show that locally-based public communication is more effective in reaching communities, but there are still shortcomings in its application on the ground. Furthermore, the lack of coordination between government, community institutions, and local media is a major barrier to strengthening environmental law enforcement. The study suggests the need for an integrated and sustainable communication approach and more optimal use of social media to raise public awareness. The contribution of this research lies in its recommendations for designing more contextual and effective communication strategies in Aceh.

**Keywords:** Public Communication, Environmental Law Enforcement, Local Wisdom, Coordination.

**ABSTRAK**

Latar belakang penelitian ini berfokus pada pentingnya komunikasi publik dalam mendukung penegakan hukum lingkungan di Aceh. Meskipun sudah ada berbagai kebijakan terkait, penerapan komunikasi publik yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum lingkungan di masyarakat Aceh masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan pemahaman masyarakat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang kurang maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana komunikasi publik dapat memperkuat penegakan hukum lingkungan di Aceh, serta mengidentifikasi kendala yang ada dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang menganalisis penelitian

terdahulu dan kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi publik yang berbasis kearifan lokal lebih efektif dalam mencapai masyarakat, tetapi masih terdapat kekurangan dalam implementasinya di lapangan. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan media lokal menjadi hambatan utama dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan. Penelitian ini menyarankan pentingnya pendekatan komunikasi yang terintegrasi dan berkelanjutan serta pemanfaatan media sosial secara lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Kontribusi penelitian ini terletak pada rekomendasi untuk merancang strategi komunikasi yang lebih kontekstual dan efektif di Aceh.

**Kata kunci:** Komunikasi Publik, Penegakan Hukum Lingkungan, Kearifan Lokal, Koordinasi.

## PENDAHULUAN

Aceh merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya alam, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga kehutanan.<sup>1</sup> Keberagaman kekayaan alam ini menjadi salah satu potensi besar untuk mendukung perekonomian daerah, namun juga membawa tantangan besar terkait pengelolaan dan perlindungan alam. Sebagai daerah dengan kekayaan alam yang melimpah, Aceh juga rentan terhadap kerusakan lingkungan, yang sering kali disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan yang berkelanjutan di provinsi ini.

Namun, penegakan hukum lingkungan di Aceh masih menghadapi banyak kendala. Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan mematuhi peraturan yang ada.<sup>2</sup> Meskipun ada berbagai regulasi hukum yang mengatur perlindungan lingkungan, penerapannya di lapangan masih sering terhambat oleh kurangnya pemahaman dan partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini menyebabkan

---

<sup>1</sup> Hijri Juliansyah and Zubaidah Zubaidah, "Pengaruh Daya Dukung Lahan Dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh," *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal* 6, no. 1 (May 31, 2023): 63–74, <https://doi.org/10.29103/jepu.v6i1.12299>.

<sup>2</sup> Sofyan A. Gani, Razali Razali, and Burhansyah Burhansyah, "Promoting Sustainability and Conservation Practices through Environmental Education in Aceh, Indonesia," *World Journal of Advanced Research and Reviews* 18, no. 3 (2023): 1174–84, <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.18.3.1186>.

penegakan hukum lingkungan belum berjalan optimal, meskipun sudah ada upaya dari pemerintah untuk mengatasinya.

Komunikasi publik memegang peranan yang sangat penting dalam memperbaiki situasi ini. Melalui komunikasi yang efektif, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan akibat buruk yang ditimbulkan oleh kerusakan alam.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang tepat menjadi kunci untuk membangun kesadaran hukum yang lebih tinggi, serta memotivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perlindungan lingkungan.

Pentingnya komunikasi publik dalam penguatan penegakan hukum lingkungan juga terlihat dari peranannya dalam menyebarluaskan informasi yang relevan.<sup>4</sup> Media massa, kampanye sosial, dan diskusi publik dapat menjadi saluran untuk menyampaikan pesan-pesan yang edukatif tentang dampak kerusakan lingkungan dan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Melalui pendekatan yang strategis dan tepat sasaran, informasi tentang hukum lingkungan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam menjaga kelestarian alam.

Dengan penerapan komunikasi publik yang baik, diharapkan penegakan hukum lingkungan di Aceh dapat lebih efektif dan berdampak positif. Masyarakat yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya dalam melindungi lingkungan akan lebih mendukung upaya pemerintah dalam penegakan hukum lingkungan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, penelitian tentang bagaimana komunikasi publik

---

<sup>3</sup> Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, Indonesia and Anselmus Sudirman, "Fostering Ecoliteracy to Enhance Environmental Awareness among Children and Adolescents," in *Educational Administration and Leadership: Perceptions of Educational Leaders in Relation to Their Leadership Style*, by University of Macedonia, Thessaloniki, Macedonia, Greece et al., 1st ed. (Innovare Academic Sciences Pvt Ltd, 2024), 14–25, <https://doi.org/10.22159/ED.c2>.

<sup>4</sup> Wulandari Marcellyna Ayuningrum and Noprita Herari, "Comparative Analysis of Government Communication Strategies in Environmental Law Enforcement: A Case Study of Indonesia (DKI Jakarta) and Singapore," *Journal of Communication and Public Relations* 3, no. 2 (July 2, 2024): 83–101, <https://doi.org/10.37535/105003220245>.

<sup>5</sup> Lisha Zhang et al., "The Influence of Public Awareness on Public Participation in Environmental Governance: Empirical Evidence in China," *Environmental Research Communications* 6, no. 9 (September 1, 2024): 095024, <https://doi.org/10.1088/2515-7620/ad792a>.

dapat menjadi alat pembantu dalam penguatan penegakan hukum lingkungan di Aceh sangat penting untuk memastikan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan pelestarian alam yang lebih baik.

Meskipun komunikasi publik diakui sebagai alat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum lingkungan, masih sangat sedikit penelitian yang mengkaji bagaimana komunikasi publik dapat secara langsung memperkuat penegakan hukum lingkungan di Aceh. Banyak kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah dan lembaga terkait untuk meningkatkan kesadaran hukum, namun hasilnya belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan komunikasi yang digunakan selama ini mungkin belum cukup efektif dalam mempengaruhi perilaku masyarakat untuk lebih patuh terhadap hukum lingkungan yang ada.

Sebagian besar inisiatif komunikasi yang dilakukan di Aceh cenderung terbatas pada penyebaran informasi secara umum mengenai pentingnya pelestarian lingkungan.<sup>6</sup> Meskipun informasi ini penting, namun belum ada pendekatan yang lebih mendalam yang dapat menggugah perubahan perilaku masyarakat, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Penelitian lebih lanjut sangat diperlukan untuk mengetahui apakah informasi yang disampaikan sudah cukup dipahami dan diterima oleh masyarakat, serta apakah informasi tersebut berhasil memotivasi tindakan nyata yang mendukung penegakan hukum lingkungan.

Selain itu, masih kurangnya pendekatan komunikasi yang mempertimbangkan keberagaman sosial dan budaya di Aceh menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Masyarakat Aceh memiliki nilai-nilai dan tradisi lokal yang sangat kental, yang dapat mempengaruhi cara mereka menerima dan merespons pesan-pesan hukum lingkungan. Oleh karena itu, perlu ada penelitian yang lebih spesifik untuk memahami bagaimana pendekatan komunikasi publik yang lebih sensitif terhadap aspek budaya lokal dapat meningkatkan efektivitas dalam penyampaian pesan-pesan hukum lingkungan.

---

<sup>6</sup> Dian Aswita et al., "Enhancing Environmental Literacy in Aceh's Tourism through an Ethnoecotourism Based Environmental Education Model," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 12, no. 3 (September 30, 2024): 1051–70, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i3.1415>.

Belum ada penelitian yang mendalam mengenai strategi komunikasi yang paling tepat untuk diterapkan di Aceh guna memperkuat penegakan hukum lingkungan. Beberapa upaya komunikasi yang sudah ada tidak didokumentasikan secara sistematis, sehingga sulit untuk mengetahui dampaknya terhadap kesadaran hukum lingkungan di kalangan masyarakat. Ini menjadi kesenjangan yang perlu diisi, agar dapat dirumuskan pendekatan yang lebih tepat dalam memperkuat penegakan hukum melalui komunikasi yang efektif dan berdampak.

Secara keseluruhan, belum ada identifikasi yang jelas mengenai metode atau strategi komunikasi publik yang dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya Aceh untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Penelitian yang mendalam dalam hal ini akan sangat penting untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih terarah, agar penegakan hukum lingkungan di Aceh dapat lebih optimal. Dengan mengisi kesenjangan ini, diharapkan komunikasi publik dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan perubahan positif bagi kelestarian lingkungan di Aceh.

Untuk mengisi kesenjangan yang ada, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana komunikasi publik dapat disesuaikan dengan kondisi lokal di Aceh. Meskipun komunikasi publik telah dilakukan dalam berbagai bentuk, dari kampanye hingga penyuluhan, efektivitasnya dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan di Aceh belum terbukti maksimal. Salah satu alasan utama adalah pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya mempertimbangkan keberagaman sosial dan budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana komunikasi publik dapat disesuaikan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan yang berkelanjutan di Aceh.

Mengapa kita harus mengisi kesenjangan ini? Komunikasi yang tepat akan mempengaruhi cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap hukum lingkungan, yang pada gilirannya dapat memperkuat penegakan hukum itu sendiri. Tanpa pendekatan yang berbasis pada konteks lokal, pesan-pesan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum lingkungan sering kali tidak

berhasil menyentuh hati masyarakat. Hal ini mengarah pada kesenjangan antara regulasi yang ada dengan perilaku nyata masyarakat yang cenderung mengabaikan atau tidak memahami sepenuhnya dampak kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami cara-cara komunikasi yang bisa lebih efektif, dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di Aceh.

Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk menemukan pendekatan komunikasi publik yang lebih tepat guna dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan di Aceh. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah mengeksplorasi bagaimana strategi komunikasi yang berbasis pada kearifan lokal dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju kepatuhan terhadap hukum lingkungan. Dengan menggali hal-hal yang belum banyak diteliti, seperti peran media lokal, keterlibatan masyarakat, dan adaptasi pesan-pesan hukum sesuai dengan budaya Aceh, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih aplikatif dan relevan dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan di daerah tersebut.

## **METODE KAJIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki suatu kejadian, kasus, atau fenomena tertentu sesuai dengan konteks aslinya secara mendalam.<sup>7</sup> Tujuannya untuk menggali bagaimana komunikasi publik dapat berperan dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan di Aceh. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam penegakan hukum lingkungan, seperti aparat pemerintah, aktivis lingkungan, dan masyarakat lokal. Selain itu, analisis dokumen juga dilakukan dengan menelaah berbagai kebijakan, laporan, serta publikasi yang berkaitan dengan komunikasi publik dan penegakan hukum lingkungan di Aceh.

---

<sup>7</sup> Mega Adyna Movitaria et al., *Metodologi Penelitian* (Sumatera Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024).

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang peran komunikasi publik dalam konteks lokal.

Selanjutnya, teknik observasi juga diterapkan untuk memahami bagaimana komunikasi publik dijalankan di lapangan, khususnya dalam kegiatan-kegiatan penyuluhan dan kampanye hukum lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat. Observasi ini dilakukan di beberapa lokasi yang memiliki tingkat kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti daerah pesisir dan hutan Aceh. Peneliti akan mengamati interaksi antara fasilitator kampanye dan masyarakat serta respon masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Hal ini akan memberikan gambaran langsung mengenai efektivitas strategi komunikasi yang digunakan dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, penelitian ini menggunakan analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tema utama terkait dengan komunikasi publik dan penegakan hukum lingkungan di Aceh. Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti keberhasilan atau kegagalan dalam komunikasi, faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi respons masyarakat, serta peran media dalam penyebaran informasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik dalam mendukung penegakan hukum lingkungan di Aceh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran dan Tantangan Komunikasi Publik dalam Penguatan Penegakan Hukum Lingkungan di Aceh**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi publik memiliki potensi yang besar dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan di Aceh, namun penerapannya masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kampanye hukum lingkungan yang memanfaatkan komunikasi berbasis kearifan lokal lebih efektif dalam menyentuh hati masyarakat, dibandingkan dengan pendekatan yang hanya

mengandalkan penyebaran informasi umum. Sebagai contoh, Luthfiana Rihadatul ‘Aisy menekankan pentingnya penggunaan bahasa dan simbol yang sesuai dengan nilai-nilai lokal untuk membangun kesadaran hukum di masyarakat.<sup>8</sup> Namun, di Aceh, masih terdapat keterbatasan dalam menerapkan komunikasi yang benar-benar disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Selain itu, meskipun telah ada berbagai kebijakan mengenai komunikasi publik untuk mendukung penegakan hukum lingkungan, kesenjangan antara kebijakan tersebut dengan implementasi di lapangan masih cukup besar. Siti Mariyam, dkk. dalam penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak dari kerusakan lingkungan dan konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan.<sup>9</sup> Masyarakat masih cenderung mengabaikan hukum lingkungan karena kurangnya edukasi yang menyeluruh mengenai hal tersebut. Temuan ini menunjukkan pentingnya tidak hanya menyebarkan informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Lebih lanjut, meskipun media massa dan media sosial telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam menyebarkan informasi mengenai hukum lingkungan, penggunaannya di Aceh masih terbatas. Reza Adriantika Suntara, dkk. menyatakan bahwa media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum, namun hal ini membutuhkan keterlibatan aktif dari pihak-pihak yang berwenang dalam menciptakan konten yang menarik dan mudah dipahami.<sup>10</sup> Di Aceh, media sosial belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum

---

<sup>8</sup> Luthfiana Rihadatul ‘Aisy et al., “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serangkat Melalui Edukasi Interaktif Mengenai Bantuan Hukum,” *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 4, no. 1 (January 24, 2024): 27–38, <https://doi.org/10.55606/kreatif.v4i1.2796>.

<sup>9</sup> Siti Mariyam, Adhi Putra Satria, and M. Samsudin, “Community Participation in the Prevention of Environmental Damage: Forms and Challenges,” *Administrative and Environmental Law Review* 4, no. 2 (July 31, 2023): 107–18, <https://doi.org/10.25041/aclr.v4i2.2992>.

<sup>10</sup> Reza Adriantika Suntara, Ndaru Satrio, and Muhammad Syaiful Anwar, “The Potential of Social Media in Increasing Young Generation’s Legal Education,” *Asatiza: Jurnal Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 221–32.



lingkungan. Temuan ini menyoroti perlunya peningkatan peran media dalam mendukung komunikasi publik yang lebih efektif.

Sebagai tambahan, penelitian ini menemukan bahwa kurangnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan media lokal dalam menjalankan kampanye komunikasi publik menjadi salah satu faktor yang menghambat penguatan penegakan hukum lingkungan. Menurut Aldenderfer, kolaborasi antara berbagai pihak sangat penting untuk menciptakan pesan yang lebih kuat dan dapat diterima oleh masyarakat.<sup>11</sup> Namun, di Aceh, masih banyak program yang berjalan secara terpisah tanpa adanya sinergi yang jelas antara pemangku kepentingan. Hal ini menyebabkan pesan yang disampaikan menjadi kurang konsisten dan tidak terarah dengan baik.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pentingnya pendekatan yang berbasis pada budaya lokal sangat mempengaruhi keberhasilan kampanye hukum lingkungan. Hasil studi menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih sensitif terhadap norma sosial dan budaya Aceh dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini sejalan dengan teori komunikasi budaya yang menyebutkan bahwa keberhasilan komunikasi publik sangat dipengaruhi oleh faktor budaya yang ada dalam masyarakat.<sup>12</sup> Dengan demikian, memahami budaya lokal Aceh menjadi kunci dalam menyusun strategi komunikasi yang lebih efektif.

Temuan ini juga memperkuat pandangan bahwa penyuluhan hukum lingkungan harus dilakukan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan berbagai elemen masyarakat. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Lange & Brick, menunjukkan bahwa kampanye hukum lingkungan yang sporadis dan tidak terstruktur dengan baik kurang efektif dalam mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat.<sup>13</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan

---

<sup>11</sup> Mark Aldenderfer, ed., *Oxford Research Encyclopedia of Anthropology*, Oxford Research Encyclopedias (New York, NY: Oxford University Press, 2021).

<sup>12</sup> William B. Gudykunst and Young Yun Kim, *Communicating with Strangers: An Approach to Intercultural Communication*, 4th ed (Boston: McGraw-Hill, 2003).

<sup>13</sup> Florian Lange and Cameron Brick, "Changing Pro-Environmental Behavior: Evidence from (Un)Successful Intervention Studies," *Sustainability* 13, no. 14 (July 12, 2021): 7748, <https://doi.org/10.3390/su13147748>.

komunikasi yang terintegrasi dan bersifat berkelanjutan, agar kesadaran hukum masyarakat terhadap isu lingkungan dapat berkembang secara lebih stabil.

Pentingnya pendekatan yang berkelanjutan juga tercermin dalam hasil penelitian ini, di mana masyarakat Aceh menunjukkan respons positif terhadap program-program yang dilakukan secara teratur dan melibatkan mereka langsung dalam kegiatan penyuluhan. Sebagai contoh, salah satu program yang melibatkan masyarakat lokal dalam menjaga kawasan konservasi di Aceh menunjukkan hasil yang cukup baik dalam meningkatkan kesadaran hukum lingkungan. Hal ini mendukung teori French & Morse bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam penyuluhan hukum sangat penting untuk keberhasilan program-program yang ada French & Morse.<sup>14</sup>

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi publik yang disesuaikan dengan konteks lokal Aceh dapat memperkuat penegakan hukum lingkungan, namun masih diperlukan peningkatan dalam koordinasi antar pemangku kepentingan dan penggunaan media yang lebih optimal. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan hal serupa, di mana koordinasi yang kurang baik antar pihak terkait dapat menghambat efektivitas kampanye komunikasi publik. Hal ini menjadi tantangan utama yang harus diatasi agar penegakan hukum lingkungan di Aceh dapat lebih berhasil.

Untuk lebih jelasnya temuan ini penulis uraikan dalam bentuk tabel 1.1. berikut ini:

No	Faktor	Temuan	Rekomendasi
1	Komunikasi berbasis kearifan lokal	Lebih efektif menyentuh masyarakat, tetapi belum diterapkan optimal	Menggunakan bahasa dan simbol lokal yang relevan
2	Kesenjangan kebijakan dan implementasi	Kebijakan sudah ada, namun implementasi di lapangan kurang baik	Memastikan kebijakan diimplementasikan secara konsisten
3	Pemanfaatan media sosial yang rendah	Media sosial belum dimanfaatkan maksimal untuk edukasi	Mengembangkan konten menarik untuk media sosial

<sup>14</sup> Charles French and George Morse, "Extension Stakeholder Engagement: An Exploration of Two Cases Exemplifying 21st Century Adaptions," *Journal of Human Sciences and Extension* 3, no. 2 (June 30, 2015), <https://doi.org/10.54718/CKPY5638>.

4	Kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan	Kurangnya sinergi menyebabkan pesan tidak konsisten	Meningkatkan koordinasi antar pemerintah, lembaga, dan media
5	Pendekatan berbasis budaya lokal	Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kampanye	Menyusun strategi komunikasi yang peka terhadap budaya
6	Pentingnya pendekatan berkelanjutan	Program berkelanjutan lebih berhasil meningkatkan kesadaran	Mengintegrasikan kampanye ke dalam program jangka panjang

Tabel ini menunjukkan bahwa komunikasi publik berbasis kearifan lokal, koordinasi antar pemangku kepentingan, dan pendekatan berkelanjutan memiliki peran penting dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan di Aceh. Meskipun kebijakan dan media sosial telah diinisiasi, implementasi yang kurang optimal dan sinergi yang lemah menghambat efektivitas kampanye. Dengan menerapkan rekomendasi seperti pemanfaatan budaya lokal, peningkatan koordinasi, dan integrasi program jangka panjang, komunikasi publik dapat menjadi alat yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan menciptakan perubahan perilaku yang mendukung kelestarian lingkungan.

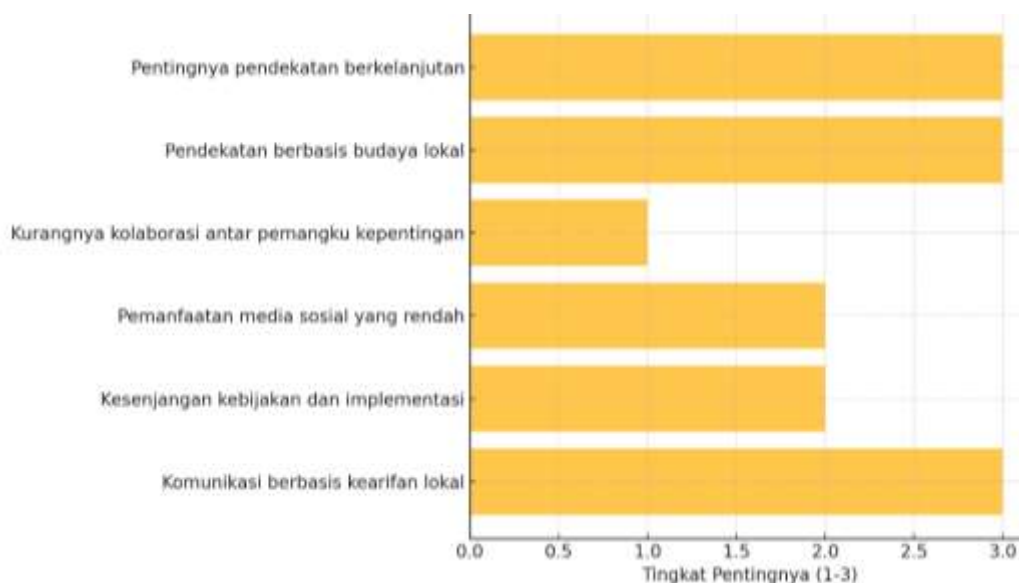
### **Pembahasan**

Menghubungkan hasil penelitian ini dengan temuan penelitian sebelumnya, terlihat bahwa komunikasi berbasis kearifan lokal memang memiliki potensi besar untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan. Pendekatan berbasis budaya lokal dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat karena lebih dekat dengan nilai-nilai dan norma yang mereka anut. Dalam konteks Aceh, yang memiliki kearifan lokal yang kuat, pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa pesan hukum lingkungan benar-benar dipahami dan diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal harus menjadi prioritas dalam setiap kampanye hukum lingkungan.

Namun, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada tantangan besar dalam mengimplementasikan pendekatan tersebut, terutama dalam hal

koordinasi antar pemangku kepentingan, meskipun sudah ada kebijakan dan upaya penyuluhan, kurangnya keselarasan antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan media menyebabkan hasil yang kurang maksimal. Kolaborasi yang lebih baik antar pihak terkait sangat penting untuk memastikan bahwa pesan komunikasi yang disampaikan tidak hanya konsisten, tetapi juga efektif dalam mempengaruhi perilaku masyarakat terkait hukum lingkungan.

Selain itu, penggunaan media sosial yang semakin berkembang menjadi alat yang sangat efektif dalam komunikasi publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Pande & Asthana yang menekankan pentingnya peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran hukum.<sup>15</sup> Meskipun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial di Aceh masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengembangkan strategi komunikasi yang lebih inovatif, dengan memanfaatkan potensi media sosial untuk mengedukasi masyarakat secara lebih luas dan efektif.



Grafik 1.1. Pentingnya Faktor dari Temuan Penelitian dalam Komunikasi Publik

Grafik batang horizontal di atas menggambarkan tingkat pentingnya setiap faktor dalam komunikasi publik untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan di Aceh. Faktor seperti komunikasi berbasis kearifan lokal,

<sup>15</sup> Pooran Chandra Pande and Dr K. B. Asthana, "Role Of Social Media In Legal Awareness," *Educational Administration: Theory and Practice* 30, no. 1 (January 3, 2024): 3770–75, <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.2968>.

pendekatan berbasis budaya lokal, dan pentingnya pendekatan berkelanjutan menunjukkan nilai kepentingan tertinggi, karena memiliki dampak langsung terhadap efektivitas kampanye dan keterlibatan masyarakat. Sebaliknya, faktor seperti kesenjangan kebijakan dan implementasi serta pemanfaatan media sosial yang rendah memiliki tingkat penting yang lebih moderat, tetapi tetap signifikan untuk diatasi guna mendukung keberhasilan program. Faktor dengan nilai terendah, yaitu kurangnya kolaborasi antar pemangku kepentingan, menyoroti perlunya sinergi yang lebih kuat agar pesan komunikasi menjadi lebih konsisten dan efektif. Grafik ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis konteks lokal adalah kunci keberhasilan strategi komunikasi publik.

## **PENUTUP**

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran komunikasi publik dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan di Aceh, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapan komunikasi publik di wilayah tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi publik memiliki potensi besar dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang dampak kerusakan lingkungan, keterbatasan media sosial, serta rendahnya kolaborasi antara pemangku kepentingan. Penerapan komunikasi berbasis kearifan lokal terbukti lebih efektif dalam menyampaikan pesan hukum lingkungan, namun implementasinya di Aceh masih terkendala oleh minimnya pemahaman tentang pentingnya menggunakan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal.

Salah satu temuan penting dari penelitian ini adalah perlunya strategi komunikasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam program-program penyuluhan hukum lingkungan. Program yang dilakukan secara sporadis dan tidak terstruktur dengan baik cenderung kurang efektif dalam mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan media

lokal menjadi kunci untuk menciptakan pesan yang lebih konsisten dan mudah diterima oleh masyarakat. Tanpa adanya sinergi yang jelas antara pemangku kepentingan, upaya penegakan hukum lingkungan akan menghadapi hambatan dalam mencapai tujuannya.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penekanan pentingnya pendekatan yang berbasis pada konteks lokal dalam komunikasi publik, khususnya di Aceh. Hasil penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana komunikasi publik yang sensitif terhadap budaya lokal dapat memperkuat penegakan hukum lingkungan, serta memberikan rekomendasi konkret mengenai perlunya koordinasi lebih baik antara pihak-pihak terkait dan pemanfaatan media sosial secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan teoritis tentang komunikasi publik, tetapi juga memberikan arahan praktis bagi kebijakan dan strategi komunikasi yang lebih efektif dalam mendukung penegakan hukum lingkungan di Aceh dan daerah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldenderfer, Mark, ed. *Oxford Research Encyclopedia of Anthropology*. Oxford Research Encyclopedias. New York, NY: Oxford University Press, 2021.
- Aswita, Dian, Anita Noviyanti, Evi Apriana, Jalaluddin Jalaluddin, Dewi Febriyanti, Herlina Herlina, and Ida Hasmita. "Enhancing Environmental Literacy in Aceh's Tourism through an Ethnoecotourism Based Environmental Education Model." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 12, no. 3 (September 30, 2024): 1051–70. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i3.1415>.
- Ayuningrum, Wulandari Marcellyna, and Noprita Herari. "Comparative Analysis of Government Communication Strategies in Environmental Law Enforcement: A Case Study of Indonesia (DKI Jakarta) and Singapore." *Journal of Communication and Public Relations* 3, no. 2 (July 2, 2024): 83–101. <https://doi.org/10.37535/105003220245>.
- French, Charles, and George Morse. "Extension Stakeholder Engagement: An Exploration of Two Cases Exemplifying 21st Century Adaptions." *Journal of Human Sciences and Extension* 3, no. 2 (June 30, 2015). <https://doi.org/10.54718/CKPY5638>.
- Gani, Sofyan A., Razali Razali, and Burhansyah Burhansyah. "Promoting Sustainability and Conservation Practices through Environmental Education in Aceh, Indonesia." *World Journal of Advanced Research and Reviews* 18, no. 3 (2023): 1174–84. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.18.3.1186>.
- Gudykunst, William B., and Young Yun Kim. *Communicating with Strangers: An Approach to Intercultural Communication*. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, 2003.
- Juliansyah, Hijri, and Zubaidah Zubaidah. "Pengaruh Daya Dukung Lahan Dan Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh." *Jurnal Ekonomi Pertanian Unimal* 6, no. 1 (May 31, 2023): 63–74. <https://doi.org/10.29103/jepu.v6i1.12299>.
- Lange, Florian, and Cameron Brick. "Changing Pro-Environmental Behavior: Evidence from (Un)Successful Intervention Studies." *Sustainability* 13, no. 14 (July 12, 2021): 7748. <https://doi.org/10.3390/su13147748>.
- Mariyam, Siti, Adhi Putra Satria, and M. Samsudin. "Community Participation in the Prevention of Environmental Damage: Forms and Challenges." *Administrative and Environmental Law Review* 4, no. 2 (July 31, 2023): 107–18. <https://doi.org/10.25041/aclr.v4i2.2992>.
- Movitaria, Mega Adyna, Ade Putra Ode Amane, Muhammad Munir, Qurnia Indah Permata, Teungku Amiruddin, Edriagus Saputra, Ilham Ilham, et al. *Metodologi Penelitian*. Sumatera Barat: CV. Afasa Pustaka, 2024.

- Pande, Pooran Chandra, and Dr K. B. Asthana. "Role Of Social Media In Legal Awareness." *Educational Administration: Theory and Practice* 30, no. 1 (January 3, 2024): 3770–75. <https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.2968>.
- Rihadatul 'Aisy, Luthfiana, Eksa Rusdiyana, Sudibya Sudibya, Dinda Dwi Prasetyani, Dinda Putri Permatasari, Alit Adi Saputra, Muhammad Ezzat Alfauzi, Moh Sayful Zuhri, and Muhamad Najib Shofy. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serangkat Melalui Edukasi Interaktif Mengenai Bantuan Hukum." *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 4, no. 1 (January 24, 2024): 27–38. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v4i1.2796>.
- Suntara, Reza Adriantika, Ndaru Satrio, and Muhammad Syaiful Anwar. "The Potential of Social Media in Increasing Young Generation's Legal Education." *Asatiza: Jurnal Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 221–32.
- Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, Indonesia, and Anselmus Sudirman. "Fostering Ecoliteracy to Enhance Environmental Awareness among Children and Adolescents." In *Educational Administration and Leadership: Perceptions of Educational Leaders in Relation to Their Leadership Style*, by University of Macedonia, Thessaloniki, Macedonia, Greece, E. Louka, D. Androutsou, University of Macedonia, Thessaloniki, Macedonia, Greece, A. Anastasiou, and University of Macedonia, Thessaloniki, Macedonia, Greece, 14–25, 1st ed. Innovare Academic Sciences Pvt Ltd, 2024. <https://doi.org/10.22159/ED.c2>.
- Zhang, Lisha, Mingyang Yue, Lingfei Qu, Biao Ren, Tao Zhu, and Rong Zheng. "The Influence of Public Awareness on Public Participation in Environmental Governance: Empirical Evidence in China." *Environmental Research Communications* 6, no. 9 (September 1, 2024): 095024. <https://doi.org/10.1088/2515-7620/ad792a>.